

BAB II

KAJIAN TEORI

A.Konsep Teoretis

Penelitian ini berlandaskan pada teori-teori pendidikan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, serta teori sikap sosial. Kajian teori bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah agar penelitian memiliki arah yang jelas dan terhindar dari kesalahpahaman konsep.

Menurut Creswell dan Creswell (2021), kajian teori memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan fokus penelitian serta membantu peneliti membangun kerangka berpikir yang sistematis. Kajian teori juga menjadi dasar untuk memahami fenomena sosial yang diteliti secara lebih mendalam.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, UNESCO (2021) menegaskan bahwa pembelajaran kewarganegaraan di sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta kemampuan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap sosial siswa.

Selanjutnya, Kemendikbudristek (2020) melalui kebijakan Profil Pelajar Pancasila menekankan bahwa pendidikan karakter di Indonesia harus diarahkan pada penguatan nilai gotong royong, kebhinekaan global, dan sikap saling menghargai 12

sebagai kompetensi utama peserta didik di abad ke-21. Dengan demikian, sikap menghargai perbedaan pendapat menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam penelitian ini, hubungan antara pembelajaran PKn dan sikap menghargai perbedaan pendapat dipahami melalui pendekatan pendidikan karakter dan pendidikan demokrasi. Hess dan McAvoy (2020) menjelaskan bahwa ruang diskusi dalam pembelajaran demokratis merupakan sarana penting untuk melatih siswa menghadapi perbedaan pandangan secara terbuka, kritis, dan penuh respek. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PPKn yang dialogis dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk sikap sosial toleran pada siswa.

Dengan demikian, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan adanya hubungan erat antara pembelajaran PKn dengan pembentukan sikap menghargai perbedaan pendapat, sehingga pembelajaran kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam membangun karakter demokratis peserta didik.

A. Tinjauan tentang Implementasi Pembelajaran

Implementasi pembelajaran merupakan tahap penting dalam proses pendidikan karena menjadi jembatan antara perencanaan pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Implementasi pembelajaran adalah proses penerapan rencana

pembelajaran yang telah disusun ke dalam kegiatan pembelajaran nyata di kelas. Tahap ini menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran, karena pada tahap inilah terjadi interaksi langsung antara guru, peserta didik, dan sumber belajar.

Menurut Darling-Hammond et al. (2020), implementasi pembelajaran mencakup proses penerapan strategi mengajar yang berorientasi pada keterlibatan

aktif peserta didik, penguatan kompetensi abad ke-21, serta penciptaan pengalaman belajar yang bermakna. Implementasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan keterampilan sosial dan karakter siswa.

Sejalan dengan pendapat tersebut, UNESCO (2021) menegaskan bahwa pembelajaran yang efektif harus bersifat inklusif, partisipatif, serta mampu menanamkan nilai demokrasi dan toleransi dalam kehidupan sosial peserta didik. Dengan demikian, implementasi pembelajaran menuntut kemampuan guru dalam mengelola kelas, memilih strategi yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan dialogis.

1. Tujuan Implementasi Pembelajaran

Tujuan utama dari implementasi pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut OECD (2021), tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar proses pembelajaran dapat diarahkan pada pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa.

Dalam pembelajaran PKn, tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan (kognitif), tetapi juga pada pembentukan sikap (afektif) dan keterampilan sosial (psikomotorik), seperti kemampuan berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta menghargai pandangan orang lain.

Kemendikbudristek (2020) melalui kebijakan Profil Pelajar Pancasila menekankan bahwa pendidikan harus membentuk peserta didik yang memiliki karakter kebhinekaan global, gotong royong, serta sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan.

2. Strategi dan Metode dalam Implementasi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan yang mencakup penggunaan metode dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut DarlingHammond et al. (2020), strategi pembelajaran yang efektif harus mendorong partisipasi siswa, kolaborasi, serta penguatan berpikir kritis melalui aktivitas reflektif dan dialogis.

Beberapa metode yang relevan dalam implementasi pembelajaran PKn antara lain:

a. Metode Diskusi

Metode diskusi memungkinkan siswa untuk saling bertukar pendapat, mengemukakan ide, serta belajar menghargai perbedaan pandangan. Menurut Hess dan McAvoy (2020), diskusi terbuka dalam pembelajaran kewarganegaraan merupakan sarana utama untuk membentuk sikap demokratis dan toleransi siswa.

b. Metode Tanya Jawab

Metode ini mendorong interaksi aktif antara guru dan siswa serta melatih keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat secara lisan. UNESCO (2021) menyebutkan bahwa komunikasi dua arah dalam kelas dapat membangun rasa saling menghargai dan keterbukaan antar peserta didik.

c. Metode Debat Terarah

Debat terarah dalam pembelajaran PKn dapat melatih siswa menyampaikan pendapat secara argumentatif, namun tetap menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Rahmawati dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa debat yang dikelola secara pedagogis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membentuk sikap toleransi.

d. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus membantu siswa memahami permasalahan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mencari solusi secara demokratis. OECD (2021) menekankan bahwa pembelajaran berbasis kasus sosial efektif untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab.

3. Media Pembelajaran dalam Implementasi Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran. Menurut OECD (2021), penggunaan media digital dan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta membuat materi lebih kontekstual dengan kehidupan mereka.

4. Evaluasi dalam Implementasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran. Menurut Kemendikbudristek (2021), evaluasi pembelajaran tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga harus mencakup penilaian karakter dan kompetensi sosial peserta didik.

Evaluasi dalam pembelajaran PKn mencakup:

a. Evaluasi Kognitif

Evaluasi kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi PKn, meliputi kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, dan menganalisis konsep kewarganegaraan. Menurut Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001), ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi.

b. Evaluasi Afektif

Evaluasi afektif digunakan untuk menilai sikap dan nilai yang dimiliki siswa, seperti menghargai perbedaan pendapat, toleransi, dan tanggung jawab. Krathwohl menjelaskan bahwa ranah afektif berkaitan dengan penerimaan, partisipasi, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan karakter berdasarkan nilai yang diyakini.

c. Evaluasi Psikomotorik

Evaluasi psikomotorik digunakan untuk menilai keterampilan siswa dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat secara santun. Menurut Simpson, ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan melakukan tindakan atau keterampilan tertentu yang diperoleh melalui latihan dan praktik.

5. Implementasi Pembelajaran PKn dalam Pembentukan Sikap

Dalam konteks PKn, implementasi pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan keterampilan sosial. UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu menginternalisasikan nilai demokrasi, toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman melalui pengalaman belajar yang nyata.

Pembelajaran PKn yang dilaksanakan secara partisipatif dan dialogis akan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menghargai perbedaan pendapat. Melalui diskusi, musyawarah, dan kerja kelompok, siswa dilatih untuk mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan pendapat secara santun, serta menerima keputusan bersama.

Dengan demikian, implementasi pembelajaran PKn yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, interaktif, dan berbasis nilai akan berperan penting dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat pada siswa.

B. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang menyampaikan pengetahuan tentang negara dan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai, moral, dan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kemendikbudristek (2020), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan, berkarakter Pancasila, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. PKn menekankan pada pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik.

Secara yuridis, keberadaan dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa PKn memiliki peran penting dalam menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara sejak dini.

Menurut UNESCO (2021), pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi strategis dalam membangun budaya demokrasi, toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat modern. Pembelajaran PKn dipandang

sebagai bagian penting dari global citizenship education yang membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan sosial, dan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Kemendikbudristek (2021) menegaskan bahwa PKn merupakan wahana utama dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya dalam dimensi berkebhinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya bertujuan mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter, etika sosial, serta perilaku demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan demikian, PKn merupakan wahana utama dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi berkebhinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Pembelajaran PKn diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beretika sosial, dan memiliki perilaku demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

b. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Kemendikbudristek (2021), tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan, berkarakter Pancasila, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara secara demokratis. Pembelajaran PKn tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga penguatan sikap, nilai, dan keterampilan sosial peserta didik dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Selanjutnya, UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan

kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi, toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman di tengah masyarakat global. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia, serta kemampuan hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat plural.

Secara lebih rinci, tujuan pembelajaran PKn meliputi:

1. Mengembangkan Sikap Demokratis

Pembelajaran PKn bertujuan menumbuhkan sikap demokratis pada peserta didik, seperti menghargai perbedaan pendapat, bersikap terbuka, serta menjunjung tinggi musyawarah. Sikap demokratis ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; Sapriya, 2020).

2. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

PKn bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa tanggung jawab tercermin dalam sikap disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. (Sapriya, 2020; Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

3. Membentuk Watak dan Karakter Bangsa

PKn berfungsi sebagai sarana pembentukan watak dan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

2022; Sapriya, 2020).

4. Mengembangkan Sikap Toleransi dan Menghargai Perbedaan

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pembelajaran PKn bertujuan menanamkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, suku, agama, budaya, maupun pandangan politik. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; UNESCO, 2021).

c. Tugas Guru PKn

Guru PKn memiliki tugas yang sangat penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik. Menurut Kemendikbudristek (2021), tugas guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik dalam rangka membentuk Profil Pelajar

Pancasila yang berkarakter dan berkompetensi kewarganegaraan.

Dalam pembelajaran PKn, tugas guru antara lain:

- 1, Merencanakan pembelajaran PKn yang berbasis nilai dan karakter
- 2.Melaksanakan pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan demokratis
- 3.Menjadi teladan dalam bersikap menghargai perbedaan pendapat

4.Membimbing siswa dalam berdiskusi dan bermusyawarah

5.Menanamkan nilai toleransi, tanggung jawab, dan keadilan

Guru PKn dituntut untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga siswa merasa aman dan nyaman dalam mengemukakan pendapat.

c. Peran Guru PKn sebagai Evaluator dalam Membentuk Sikap

Menghargai Perbedaan Pendapat

Guru PKn tidak hanya berperan sebagai penyampai materi dan pembimbing, tetapi juga memiliki peran penting sebagai evaluator dalam proses pembelajaran. Peran guru sebagai evaluator sangat menentukan keberhasilan pembelajaran PKn, khususnya dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat pada peserta didik. Evaluasi dalam pembelajaran PKn tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik.

Menurut Arifin (2021), evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks PKn, evaluasi tidak cukup hanya mengukur penguasaan materi tentang Pancasila, UUD 1945, atau demokrasi, tetapi juga harus mampu menilai perubahan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Guru PKn sebagai evaluator memiliki tanggung jawab untuk menilai sejauh mana siswa mampu menunjukkan sikap demokratis, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat, baik di dalam maupun di luar kelas. Penilaian sikap ini sangat penting karena sikap menghargai perbedaan pendapat merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan kewarganegaraan. Hal

ini sejalan dengan pendapat Winataputra (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap kewargaan peserta didik.

Menurut Mulyasa (2021), evaluasi sikap dapat dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain observasi langsung, jurnal sikap, penilaian diri (self assessment), dan penilaian antar teman (peer assessment). Melalui observasi, guru dapat melihat bagaimana siswa bersikap saat berdiskusi, apakah siswa mau mendengarkan pendapat teman, tidak memaksakan kehendak, serta mampu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan.

Selain itu, guru PKn juga berperan dalam memberikan umpan balik (feedback) terhadap sikap siswa. Umpan balik ini bertujuan untuk memperbaiki sikap yang kurang sesuai dan memperkuat sikap positif yang telah dimiliki siswa. Anderson dan Krathwohl (2020) menyatakan bahwa umpan balik yang konstruktif dalam proses evaluasi berperan penting dalam membantu peserta didik mengembangkan sikap dan perilaku yang diharapkan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter.

Peran guru sebagai evaluator juga mencakup evaluasi terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Guru perlu merefleksikan apakah metode dan strategi pembelajaran yang digunakan sudah efektif dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat. Jika belum, guru perlu melakukan perbaikan dan inovasi dalam pembelajaran PKn agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell dan Poth (2021) yang

menekankan pentingnya refleksi berkelanjutan dalam praktik pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa guru PKn memiliki peran penting sebagai evaluator dalam proses pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran PKn tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik, khususnya dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat pada peserta didik.

Sebagai evaluator, guru PKn bertanggung jawab menilai sikap demokratis dan toleran siswa melalui berbagai teknik penilaian, seperti observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter melalui pemberian umpan balik yang konstruktif serta refleksi terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PKn.

d. Faktor Penghambat Guru dalam Membentuk Sikap Menghargai Perbedaan Pendapat

Dalam praktiknya, guru PKn sering menghadapi berbagai hambatan dalam upaya membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat pada peserta didik. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam diri peserta didik, antara lain:

a. Perbedaan karakter dan kepribadian siswa

Setiap siswa memiliki latar belakang karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Ada siswa yang terbuka dan mudah menerima pendapat orang lain, namun ada pula siswa yang cenderung egois dan sulit menerima perbedaan pendapat. Menurut Santrock (2020), perbedaan kepribadian dan temperamen pada remaja sangat memengaruhi cara individu berinteraksi sosial, termasuk dalam menerima pandangan dan pendapat orang lain. Perbedaan karakter ini menjadi tantangan bagi guru PKn dalam menanamkan sikap toleransi secara merata kepada seluruh siswa.

b. Kurangnya kesadaran siswa terhadap nilai toleransi

Sebagian siswa belum memahami secara utuh pentingnya sikap menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan demokratis, sehingga masih sering memaksakan kehendak atau meremehkan pendapat teman. Hal ini sejalan dengan pendapat Winataputra (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran nilai-nilai kewarganegaraan pada peserta didik dapat menghambat pembentukan sikap demokratis dan toleran. Oleh karena itu, internalisasi nilai toleransi melalui pembelajaran PKn menjadi sangat penting.

c. Emosi dan kedewasaan siswa yang belum stabil

Pada usia remaja, kondisi emosi siswa cenderung belum stabil, sehingga mudah tersinggung dan kesulitan mengendalikan diri ketika menghadapi perbedaan pendapat. Menurut Hurlock (2021), masa remaja merupakan fase perkembangan emosi yang masih labil, di mana individu sedang belajar mengelola perasaan dan respons sosialnya. Ketidakstabilan

emosi ini sering kali berdampak pada munculnya konflik dalam diskusi atau interaksi antarsiswa.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar diri siswa, antara

lain:

a. Pengaruh lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga yang kurang menanamkan nilai toleransi dan demokrasi dapat memengaruhi sikap siswa di sekolah. Menurut Lickona (2021), keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga, termasuk sikap menghargai perbedaan, akan terbawa dalam perilaku anak di lingkungan sekolah. Apabila keluarga kurang memberikan teladan sikap toleran, maka siswa cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan sikap tersebut di sekolah.

b. Pengaruh lingkungan sosial dan media sosial

Lingkungan sosial, khususnya media sosial, sering kali menampilkan perdebatan yang tidak sehat, seperti saling menghujat dan tidak menghargai perbedaan pendapat. Kondisi ini dapat memengaruhi cara berpikir dan bersikap siswa. Menurut Nasrullah (2020), media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku remaja karena intensitas penggunaannya yang tinggi. Paparan konten negatif di media sosial dapat melemahkan nilai toleransi dan memperkuat sikap intoleran dalam kehidupan sehari-hari.

c. Keterbatasan waktu pembelajaran PKn

Waktu pembelajaran PKn yang terbatas membuat guru sulit memberikan pembelajaran nilai secara mendalam dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suyanto dan Asep Jihad (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran nilai dan karakter membutuhkan waktu yang cukup, konsistensi, serta pembiasaan yang berkelanjutan agar dapat membentuk sikap peserta didik secara optimal.

d. Kurangnya dukungan lingkungan sekolah

Jika budaya sekolah belum sepenuhnya mendukung nilai demokrasi dan toleransi, maka upaya guru PKn dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat akan kurang optimal. Menurut Kemendikbudristek (2020), keberhasilan pendidikan karakter sangat ditentukan oleh budaya sekolah yang kondusif dan partisipasi seluruh warga sekolah. Tanpa dukungan lingkungan sekolah yang positif, pembelajaran PKn akan sulit mencapai tujuan pembentukan sikap secara maksimal.

Hambatan-hambatan tersebut menuntut guru PKn untuk memiliki kreativitas, kesabaran, serta strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai secara optimal.

e. Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Sikap Menghargai Perbedaan Pendapat

Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan sekolah. Aktualisasi ini penting agar pembelajaran PKn

tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat aplikatif dan bermakna bagi peserta didik.

Menurut Winataputra (2020), pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan secara kontekstual dan berorientasi pada kehidupan nyata peserta didik agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat terinternalisasi secara efektif. Oleh karena itu, guru PKn perlu mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dan permasalahan yang sering dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan pendapat, sikap toleransi, dan kehidupan demokratis di lingkungan sekolah.

Sejalan dengan itu, Creswell dan Poth (2021) menegaskan bahwa pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman nyata mampu meningkatkan pemahaman nilai serta membentuk sikap peserta didik secara lebih mendalam. Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai PKn menjadi sarana penting dalam membentuk karakter siswa yang demokratis dan toleran.

Aktualisasi nilai PKn dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Diskusi dan Musyawarah di Kelas

Melalui diskusi kelompok dan musyawarah kelas, siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, serta menerima keputusan bersama. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; Pusat Penelitian Kebijakan, 2021).

2. Kegiatan Organisasi Siswa (OSIS)

Kegiatan OSIS menjadi sarana nyata bagi siswa untuk mempraktikkan nilai demokrasi, seperti pemilihan pengurus, rapat, dan pengambilan keputusan bersama. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; UNESCO, 2021).

3. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan menghargai berbagai pendapat yang muncul. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; Sapriya, 2020).

4. Penyelesaian Konflik secara Demokratis

Guru PKn dapat membimbing siswa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan atau paksaan. (UNESCO, 2021; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

5. Pembiasaan Sikap Toleran dalam Budaya Sekolah

Budaya sekolah yang menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan akan memperkuat aktualisasi nilai PKn dalam kehidupan siswa. (UNESCO, 2021; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Melalui aktualisasi tersebut, pembelajaran PKn tidak hanya menghasilkan siswa yang memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, sikap menghargai perbedaan pendapat dapat terbentuk secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari karakter siswa

C. Tinjauan tentang Sikap Menghargai Perbedaan Pendapat

1. Pengertian Sikap

Sejalan dengan pendapat tersebut, Maio, Haddock, dan Verplanken (2020) menjelaskan bahwa sikap berkembang melalui proses belajar sosial, penguatan nilai, serta pembiasaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sikap peserta didik karena sekolah menjadi ruang utama terjadinya interaksi sosial, internalisasi nilai, dan pembentukan karakter.

Lebih lanjut, para ahli menyatakan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Menurut McLeod (2020), komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan individu terhadap suatu objek. Komponen afektif berhubungan dengan perasaan atau emosi yang muncul, sedangkan komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan perilaku atau tindakan sebagai perwujudan dari sikap yang dimiliki. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk sikap individu secara utuh.

Dalam konteks pendidikan, khususnya di sekolah menengah atas, sikap siswa sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, interaksi dengan guru dan teman sebaya, serta nilai-nilai yang ditanamkan melalui mata pelajaran tertentu. Winataputra (2020) menegaskan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk sikap kewarganegaraan peserta didik, termasuk sikap demokratis dan menghargai perbedaan pendapat sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

2. Pengertian Menghargai Perbedaan Pendapat

Menghargai perbedaan pendapat merupakan salah satu bentuk sikap demokratis yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Winataputra (2020), sikap menghargai perbedaan pendapat adalah kemampuan individu untuk menerima keberagaman pandangan, gagasan, dan pemikiran orang lain serta menyikapinya secara terbuka, santun, dan bertanggung jawab dalam kerangka kehidupan demokratis. Sikap ini menuntut individu untuk tidak memandang pendapat pribadi sebagai satu-satunya kebenaran, melainkan mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Dalam kehidupan demokratis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, pengalaman, serta tingkat pemahaman akan melahirkan sudut pandang yang beragam. Dahl (2021) menegaskan bahwa keberagaman pendapat merupakan ciri utama masyarakat demokratis yang sehat, sehingga diperlukan sikap saling menghargai agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik. Oleh karena itu, sikap menghargai perbedaan pendapat menjadi kunci dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis, mencegah konflik, serta membangun kerja sama yang produktif.

Di lingkungan sekolah, khususnya pada siswa SMA, sikap menghargai perbedaan pendapat sangat relevan untuk dikembangkan karena siswa berada pada fase perkembangan remaja yang cenderung kritis, emosional, dan memiliki kebutuhan untuk diakui pendapatnya. Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat secara

rasional, mendengarkan pandangan orang lain, serta menerima keputusan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kemendikbudristek (2020) yang menekankan bahwa pembelajaran PKn berfungsi membentuk karakter demokratis dan toleran pada peserta didik.

Sikap menghargai perbedaan pendapat dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Menurut Lickona (2021), indikator sikap demokratis dalam konteks pendidikan antara lain:

- 1.) Mampu mendengarkan pendapat orang lain, yaitu kesediaan siswa untuk memberi kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat tanpa memotong pembicaraan atau meremehkannya.
- 2.) Tidak memaksakan kehendak, yaitu sikap menerima bahwa pendapat pribadi tidak selalu harus diterima oleh semua pihak.
- 3.) Memberikan tanggapan dengan bahasa yang sopan, yaitu kemampuan menyampaikan kritik atau sanggahan secara santun dan menghargai perasaan orang lain.
- 4.) Menerima hasil musyawarah, yaitu kesediaan siswa untuk menerima keputusan bersama meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat pribadinya.

Indikator-indikator tersebut mencerminkan perilaku demokratis yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

D. Peran Guru PKn dalam Membentuk Sikap Menghargai Perbedaan Pendapat

Guru PKn memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sikap menghargai perbedaan pendapat pada siswa. Hal ini disebabkan karena mata

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter warga negara yang demokratis. Menurut Winataputra (2020), guru PKn berperan sebagai pendidik nilai, teladan, fasilitator pembelajaran, dan evaluator dalam membentuk karakter kewarganegaraan peserta didik.

Sebagai pendidik, guru PKn bertugas menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan saling menghormati melalui materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru tidak hanya menyampaikan konsep secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena sosial dan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Samsuri (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn harus bersifat kontekstual agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat diinternalisasi secara efektif oleh peserta didik.

Sebagai model atau teladan, guru PKn dituntut untuk menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat dalam setiap interaksi dengan siswa. Sikap guru dalam menerima kritik, mendengarkan pendapat siswa, serta bersikap adil akan menjadi contoh nyata yang dapat ditiru oleh siswa. Menurut Lickona (2021), keteladanan guru merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pendidikan karakter di sekolah.

Sebagai fasilitator, guru PKn berperan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis dan kondusif, antara lain dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk menyampaikan pendapat, mengelola diskusi kelas secara sehat, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan terbuka. Kemendikbudristek (2020) menegaskan bahwa pembelajaran yang partisipatif dan dialogis sangat efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis dan toleran pada peserta didik.

Sebagai evaluator, guru PKn melakukan penilaian terhadap perkembangan sikap siswa, khususnya sikap menghargai perbedaan pendapat. Penilaian ini dapat dilakukan melalui observasi, jurnal sikap, penilaian diri (self assessment), maupun penilaian antarteman (peer assessment). Menurut Arifin (2021), penilaian sikap dalam pembelajaran harus dilakukan secara berkelanjutan dan autentik agar mampu menggambarkan perkembangan karakter peserta didik secara utuh.

